NAMA : TRI AULIA UTAMI

NIM : 10200120249

KELAS : HTN-F

RESUME HUKUM TATA NEGARA

“PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM”

A. PARTAI POLITIK

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam Negara. Berikut pengertian partai politik menurut beberapa ahli yaitu :

1). Miriam budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

2). Sigmud Neumann dalam *modern political parties* mengemukakan definisi sebagai berikut : *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

3). Carl J. Friedrich: *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages* (partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil).

4). Robert K. Carr, *political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government* (partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, sebagai berikut : partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

Negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat pada akhir abad ke-19. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para penduduknya menjelang masa pemilihan umum yang biasa dinamakan *caucus party*. Oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa, oleh karena itu lahirlah partai politik. Yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain.

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Sebenarnya cikal-bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Partai politik yang lahir sebelum merdeka tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa dilihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.

Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Perkumpulan ini merupakan bentuk dari *study club*, perkumpulan sosial, ekonomi, dan organisasi pendidikan. Setelah Budi Utomo lahir, muncullah dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan Indische Partij. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan ancaman bagi Budi Utomo, karena banyak anggota-anggotanya yang pindah ke kedua organisasi tersebut. Semenjak itulah Budi Utomo mulai mengarah kepada kegiatan politik. Selain itu juga banyak juga muncul organisasi-organisasi lainnya seperti ISDV/PARTAI KOMUNIS INDONESIA, MUHAMMADIYAH, dan PARTAI NASIONAL INDONESIA dll.

Seiring berjalannya waktu, partai politik terus mengalami perkembangan. Perkembangan partai politik tersebut disebabkan oleh perkembangan demokrasi di berbagai Negara di dunia. Menurut Puhle, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi partai politik adalah: (1) *the electoral dimension*; (2) *the interest of party constituency*; (3) *party organization*; (4) *the party system*; (5) *policy formulation (program and ideology)* (6)

policy implemmentation. Evolusi atau perkembangan partai politik tersebut bisa dari segi ideologi, keanggotaan, orientasi, dan program kerja partai. Perubahan yang terjadi pada partai politik ini menimbulkan lahirnya berbagai macam model atau tipologi partai politik.

Terdapat tiga teori asal mula terbentuknya partai politik yang dikemukakan oleh Lapalombara dan Weiner, yaitu: (1) teori kelembagaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik, (2) teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas, dan (3) teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Partai politik merupakan instrument yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi di Negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah Negara jika tidak ada partai politik di Negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Richard H. Pides mengatakan bahwa adanya tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.

Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, menurut Mac Iver, praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada Negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintahan yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu.

Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut

ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye. Setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).

B. PEMILIHAN UMUM

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka hal itu mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara.

Samuel p. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk Negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta mempunyai bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum juga disebut dengan arena “political market” yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspisasikan kehendak mereka.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu berikutnya jika kinerja selama menjadi pejabat dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat.

Wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk mempresentasikan suara rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representative dan bertanggung jawab, pemilu juga digunakan sebagai parameter penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, pemilu yang dilaksanakan haruslah merupakan cerminan dari pelaksanaan demokrasi dengan baik sehingga dapat dikatakan *“democracy as the only game in town”*.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dengan kata lain, kita dapat juga mengartikan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. ciri sebuah sistem adalah pertama, bahwa setiap perbahan dalam satu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem. Kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Juga perlu diperhatikan bahwa sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu.

Seiring dengan semakin diterimanya demokrasi oleh banyak Negara di dunia, maka pemilu yang dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyeleksi pejabat publik juga semakin banyak yang diadopsi oleh banyak Negara di dunia tersebut. Walaupun pemilu merupakan sistem pemilihan yang berasal dari barat, namun saat ini banyak Negara di dunia yang telah menerima pemilu sebagai mekanisme pemilihan yang terbaik.

Pada tahun 1975 hanya 33 negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pemimpinnya.

Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu Negara.

Namun, apa pun dasar pertimbangan dan kondisi dalam memutuskan suatu sistem pemilu, Donald L. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memerhatikan hal-hal yang diterapkan sebagai berikut :

- perbandingan kursi dengan jumlah suara
- akuntabilitasnya bagi konstituen (pemilih)
- memungkinkan pemerintah dapat bertahan
- menghasilkan pemenang mayoritas
- membuat koalisi antaretnis dan antaragama
- minoritas dapat duduk di jabatan publik

berdasarkan keenam hal yang disampaikan oleh Horowitz tersebut maka dapat kita pahami bahwa aspek yang ditekankan adalah pada aspek hasil dari suatu pemilu apa pun sistem apa pun sistem yang dipakai oleh suatu Negara. Hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Horowitz adalah, sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Ini merupakan hal yang sangat penting dan sering kali menjadi persoalan di Negara yang multietnis atau multiagama. Di negara yang majemuk terkadang kelompok minoritas agak terabaikan dan konflik antaretnis/antaragama sering muncul. Melalui sistem pemilu yang dilaksanakan dengan baik, konflik yang berpotensi muncul di tingkat akar rumput bisa diatasi oleh para wakilnya yang berada di parlemen.

REFERENSI :

Labolo, Muhadam. Teguh Ilham. 2015. *Partai politik dan sistem pemilihan di Indonesia /teori, konsep, dan isu strategis*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PUSADA.